

BAB III

BERDIRINYA ORDE BARU

A. Latar belakang Dan Proses Berdirinya.

Kelahiran Orde Baru dilatar-belakangi oleh terjadinya kekacauan politik pada masa Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin ini diawali dengan keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi tentang pembubaran konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945.

Dengan Dekrit Presiden ini, membuat Soekarno bukan lagi hanya sekedar sebagai kepala negara sebagaimana yang diatur dalam UUDS 1950, tapi telah menempatkan Soekarno sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, sebab menurut UUD 1945 dinyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan (pasal 4). Lebih dari itu, setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 9 Juli 1959 Soekarno membubarkan kabinet Juanda, kemudian menunjuk dirinya sebagai formatur untuk membentuk kabinet baru (kabinet kerja) yang nantinya dipimpin oleh dirinya sendiri.<sup>1</sup> Dengan demikian Soekarno telah berhasil menempatkan dirinya sebagai posisi sentral menjadi pilar dalam mekanisme kehidupan politik Nasional.

Kedudukan Soekarno sebagai pemegang kunci dalam

---

<sup>1</sup>Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia IV, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal 311.

kehidupan politik nasional ini, membuatnya lebih leluasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional dan menyimpang dari UUD 1945 yang didekritkannya sendiri. Melalui Penetapan Presiden no. 2 tahun 1959 Soekarno membentuk MPRS yang anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Soekarno sendiri, yang semestinya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Bahkan MPR yang menurut UUD 1945 merupakan lembaga tertinggi dalam struktur pemerintahan, harus menyesuaikan diri dengan kehendak Soekarno, mereka harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu :

1. Setuju kembali kepada UUD 1945.
2. Setia kepada perjuangan RI, dan
3. Setuju dengan manifesto politik.<sup>2</sup>

Di samping itu pidato kenegaraan presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" juga dijadikan GBHN yang dinamakan manifesto politik (manipol) yang semestinya menjadi hak MPR untuk merumuskannya.<sup>3</sup>

Kemudian pada tahun 1960, DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan karena menolak rancangan anggaran belanja negara -pada hal penolakan ini sesuai dengan UUD 1945 adalah bisa saja dilakukan- kemudian diganti dengan DPR Gotang Royong yang anggota-anggotanya diangkat oleh

---

<sup>2</sup>Ibid., hal. 311.

<sup>3</sup>Dr. A. Syafi'i Maarif, Islam Dan Politik Di Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1988, hal. 53.

Soekarno sendiri.<sup>4</sup> Demikian juga pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS, merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945. Lebih dari itu, ide presiden Soekarno untuk mempersatukan bangsa Indonesia ke dalam Nasakom (Nasionalisme-Agama-Komunisme) merupakan bentuk lain dari penyelewengan terhadap Pancasila. Dengan adanya Nasakom maka secara politis sangat menguntungkan PKI karena hal itu berarti memperkokoh kehadirannya sebagai unsur yang syah dalam konstelasi politik Indonesia, sementara faham komunis sendiri tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Pancasila.

Tindakan-tindakan Soekarno seperti di atas telah membawa situasi politik Indonesia ke arah yang tidak stabil, sebab tindakan-tindakan tersebut tentu saja mendapat reaksi terutama dari Masyumi, sebagai Partai Islam terbesar saat itu, yang memang sejak semula menolak sistem demokrasi dan konsepsi kepala negara itu. Demikian juga reaksi tersebut datang dari beberapa tokoh NU.<sup>5</sup> Reaksi Masyumi tersebut kemudian ternyata membawa partai ini semakin disingkirkan dari sistem pemerintahan dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1960.

Sementara itu masa demokrasi terpimpin nampaknya merupakan masa yang dinanti-nantikan oleh PKI untuk memperoleh kekuatan politik yang lebih berarti. Partai PKI

---

<sup>4</sup>Deliar Noer, Partai Islam Di Pentas Nasional, Grafiti Pers, Jakarta, 1987, hal. 366.

<sup>5</sup>Ibid., hal. 353

sejak kegagalannya pada tahun 1948 dalam pemberontakannya yang dikenal dengan "peristiwa Madiun", telah berusaha untuk membengun partainya lagi. Usaha PKI ini memang tidak sia-sia sehingga pemilu tahun 1955 ia berhasil keluar sebagai kelompok empat partai besar setelah PNI, Masyumi dan NU.

Keberhasilan yang diraih dalam pemilu 1955 ini memberikan dorongan bagi PKI untuk kembali bersuara menciptakan sistem demokrasi rakyat dan mewujudkan masyarakat sosialis dan masyarakat komunis.<sup>6</sup> Untuk mencapai ambisi politiknya PKI berusaha menanamkan pengaruh di berbagai kehidupan kenegaraan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun di bidang pertahanan keamanan. Dalam strategi perjuangan PKI yang disusun dalam kongres ke lima tahun 1954 disebutkan bahwa salah satu sasaran utama perjuangannya adalah menanamkan paham komunis di kalangan ABRI.<sup>7</sup> Bahkan dalam bidang ideologi PKI dengan gigih berusaha mengganti sila pertama dari Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dengan rumusan "Kemerdekaan Beragama".<sup>8</sup>

Dengan demokrasi terpimpin, dimana Manipol yang kemudian diikuti Usdek dan Nasakom menjadi GPHN-nya, berarti telah memberikan posisi bagi PKI untuk melakukan

---

<sup>6</sup> Nugroho Notosusanto, Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal. 1

<sup>7</sup> Ibid., hal. 2.

<sup>8</sup> Ibid., hal. 1.

usaha-usaha dalam rangka mencapai ambisi politiknya secara lebih leluasa. Karena itu PKI adalah merupakan partai yang paling mendukung terhadap gagasan Soekarno tersebut. D.N. Aidit -ketua CC. PKI- misalnya, mengatakan "melaksanakan Manipol secara konsekwen, adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI... hanya kaum manipolis munafik dan kaum reaksionerlah yang berusaha menghambat dan menyabot Manipol". Dengan cara "menempel" pada Soekarno ia berusaha memperoleh kesan sebagai golongan yang Pancasilais.<sup>9</sup>

Sementara itu, militer khususnya Angkatan Darat yang memang anti komunis (karena pengalaman pahit dalam mematahkan pemberontakan PKI untuk merebut kekuasaan di Madiun tahun 1948) dengan gigih menolak PKI ikut dalam sistem pemerintahan. Hal ini membuat hubungan ABRI dengan presiden Soekarno menjadi renggang. Kerenggangan hubungan ABRI dengan Soekarno ini dimanfaatkan oleh PKI, sehingga tingkah laku politik Soekarno selalu memberi angin kepada PKI, politik luar negerinya semakin condong ke kiri dan politik dalam negerinya tampak sekali membela konsep-konsep PKI.<sup>10</sup>

Ide-ide yang dilontarkan PKI selalu sejalan dengan ide presiden, antara lain usaha untuk menasakom-

---

<sup>9</sup>Marwati Djoened Poesponegoro, Op.Cit., hal. 317

<sup>10</sup>Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1986, hal. 41-43.

kan pimpinan militer. Usaha ini berhasil di mana Panglima AD. Letnan Jendral Ahmad Yani tahun 1964 mengatakan bahwa secara resmi AD. mendukung NASAKOM.<sup>11</sup>

Dalam bidang Hankam, dilontarkan gagasan pembentukan angkatan ke V yang terdiri dari kaum tani dan buruh yang dipersenjatai, di mana PKI mempunyai jaringan yang cukup kuat di dalamnya. Dari bukti-bukti yang kemudian di peroleh dalam sidang MAHMILUB bekas waperdam I Dr. Subandrio diperoleh fakta bahwa gagasan pembentukan angkatan ke V berasal dari PKI yang didukung RRC.<sup>12</sup> Gagasan ini mendapat tantangan keras dari AD.<sup>13</sup>

TNI-AD dengan demikian dinilai oleh PKI sebagai kekuatan yang menjadi penghalang utama usaha mereka untuk merebut kekuasaan negara. Oleh karena itu mereka berusaha menyingkirkan penghalang utama itu dengan cara mendiskreditkan pimpinan-pimpinan TNI-AD dengan berbagai macam cara, antara lain dengan menuduh TNI-AD sebagai kapitalis birokrat (KABIR). Dalam berbagai kesempatan DN. Aidit menyatakan :

"Mereka dinasti kapitalis birokrat adalah orang-orang yang kaya dolar dan kaya rupiah... Kaum Kapitalis Birokrat adalah juga pendukung-pendukung tuan tanah, mereka menghasut alat-alat negara

---

<sup>11</sup>Chairul Anam, Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan NU, Jatayu, Sala, 1985, hal. 224

<sup>12</sup>Drs. Cosmas Patubara, Sejarah Orde Baru, Dalam Dwi Widu Orde Baru, Badan Penerbit Almanak RI, hal. 10.

<sup>13</sup>Alfian, Op.Cit., hal. 44.

supaya memusuhi kaum tani... Dalam kekuasaan negara kaum Kapitalis Birokrat adalah pelindung dari setan setan desa.<sup>14</sup>

Usaha lain untuk mendiskreditkan TNI-AD adalah dengan menyebarkan isue bahwa di kalangan TNI-AD terdapat "Dewan Jendral" yang bertujuan mengadakan kudeta. Mereka mengatakan :

"Dewan Jendral anggotanya berjumlah 40 orang, 10 orang di antaranya menjadi pimpinan harian, antara lain Jendral A.H. Nasution, Jendral A. Yani, Jendral S. Parman, Jendral Suprpto dan Jendral Sutoyo. Mereka bertujuan mengkanankan politik RI dan akan mengadakan kudeta di sekitar hari ABRI tahun 1965"<sup>15</sup>

Dengan isue-isue yang memburuk-burukkan pimpinan TNI-AD itu PKI mengharapkan rakyat akan membenci TNI-AD, dan pada saat PKI akan merebut kekuasaan mereka akan men dukungnya.

Usaha-usaha untuk mendiskreditkan TNI-AD ini terus ditingkatkan sehingga pertikaian antara ke duanya-pun semakin meningkat. Lebih-lebih lagi karena kegiatan Soekarno yang menyokong PKI itu semakin meningkat sehingga PKI-pun semakin bergairah meningkatkan apa yang kemudian disebutnya "ofensif revolusioner" seperti fobi, mendengung-dengungkan bahwa "anti Nasakom adalah anti Panoasila dan kontra revolusioner", bahwa "PKI adalah yang paling progresif revolusioner" dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Nugroho Notosusanto, Op.Cit., hal. 24-25.

<sup>15</sup>Ibid., hal. 23.

<sup>16</sup>Marwati Djoened Poesponegoro, Op.Cit., hal. 319

Hal semacam ini membuat situasi politik nasional semakin panas.

Di sisi lain, perekonomian negara pada saat ini juga cukup parah. Laju inflasi telah mencapai angka sekitar 400 - 650 %. Akibatnya harga barang termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok telah melonjak tak terkendalikan. Defisit anggaran belanja semakin membesar, hal ini menambah tingginya angka inflasi, sedang persediaan devisa negara menunjukkan angka menipis sekitar US \$ 140 juta (1 US \$ = Rp 45) sehingga impor barang dari luar negeri termasuk kebutuhan-kebutuhan yang vital menjadi terbatas.<sup>17</sup> Kemerosotan perekonomian ini juga merupakan bentuk lain yang ikut mendorong situasi politik ke arah yang jauh dari stabil.

Setelah PKI merasa dirinya sudah kuat, ia mengubah taktik perjuangannya menjadi ofensif revolusioner terhadap semua kekuatan sosial politik yang tidak disenanginya. Menjelang akhir tahun 1964 dan masuk tahun 1965, sikap PKI semakin agresif. Ia melancarkan serangan terhadap tokoh-tokoh politik yang dianggap lawannya dengan tuduhan kontra revolusi, anti Pancasila, anti Pimpinan Besar Revolusi, anti Manipol, antek CIA dll.

Persiapan untuk mengadakan pemberontakan semakin intensif dilakukan mulai bulan Agustus 1965 sehubungan dengan sakitnya Presiden Soekarno yang dinilai sangat

---

<sup>17</sup>Drs. Cosmas Batubara, Op.Cit., hal. 10.



serius yang selama ini mereka banyak mendapatkan perlindungan darinya. Melihat perkembangan situasi yang demikian itu, DN. Aidit -ketua CC. PKI- segera mengadakan pertemuan bersama anggota pimpinan lainnya. Dalam pertemuan itu diputuskan untuk mempercepat bagan waktu peralihan dari taktik demokratis-parlementer ke taktik kekerasan, karena menurut penilaian mereka bahwa perimbangan kekuatan berada di pihak mereka.<sup>18</sup>

Setelah persiapan-persiapan cukup matang dan situasi menurut penilaian mereka telah memungkinkan, pada hari Kamis malam 30 September 1965 mereka mulai bergerak untuk merebut kekuasaan dengan nama G 30 S/PKI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo -Komando Pengawal Presiden Cakrabirawa.<sup>19</sup> G 30 S/PKI ini merupakan puncak dari pertikaian-pertikaian antara kekuatan-kekuatan politik pada masa Demokrasi Terpimpin, terutama antara militer dan PKI.

Gerakan ini diawali dengan pensulikan terhadap perwira-perwira TNI-AD yang dituduh sebagai anggota Dewan Jendral yang menjadi penghalang utama keinginan-keinginan PKI. Mereka yang diculik itu adalah :

1. Menteri / Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad)  
Letnan Jendral Ahmad Yani.

---

<sup>18</sup> Nugroho Notosusanto, Op.Cit., hal. 25.

<sup>19</sup> 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 43.

2. Deputi II Pangad, Mayor Jendral R. Suprpto.
3. Deputi III Pangad, Mayor Jendral Harjono Mas Tirtodarmo.
4. Asisten Pangad, Mayor Jendral Siswondo Parman.
5. Inspektur Kehakiman / Oditur Jendral Angkatan Darat Brigadir Jendral Soetojo Siswomiharjo.

Mereka dianiaya dan dibunuh secara keji oleh anggota-anggota Pemuda Rakyat, Gerwani dan lain-lain organisasi satelit PKI, lalu jenazah mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua lalu ditimbun dengan sampah dan tanah di desa Lubang Buaya sebelah selatan pangkalan udara utama Halim Perdanakusuma.

Sedang Abdul Haris Nasution, Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan / Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Menko Hankam / Kasab) berhasil meloloskan diri dari bahaya penculikan, tapi putri beliau, Adek Irma Suryani tewas akibat tindakan penculik. Korban lain dari tragedi G 30 S/PKI ini adalah Ajudan A.H. Nasution yaitu Letnan Satu Pierre Andries Tendeau dan pengawal rumah wakil Perdana Menteri II Dr. Leimena yaitu Brigadir Polisi (Pembantu Letnan) Karel Satsuit Tubun.<sup>20</sup>

Bersamaan dengan aksi penculikan itu, mereka juga menguasai obyek-obyek vital seperti studio RRI pada pukul 06.50 kemudian gedung telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan pada 06.30. Bahkan seluruh jaringan telepon sudah berada di tangan Gerakan 30 September.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Marwati Djoened Posponegoro, Op.Cit., hal. 390.

<sup>21</sup> Soegiarso Soerojo, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, CV. Sri Murni, Jakarta, 1988, hal. 217.

Melalui RRI yang sudah dikuasainya ini mereka mengumumkan bahwa gerakan mereka ditujukan pada jenderal-jenderal anggota Dewan Jendral yang akan mengadakan kudeta. Mereka juga mengumumkan sebuah dekrit tentang penomisioneran Kabinet Dwikora dan pembentukan Dewan Revolusi.<sup>22</sup>

Pada tanggal 1 Oktober itu pula Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto mendapat laporan mengenai terjadinya penculikan dan pembunuhan-pembunuhan. Segera ia mengadakan langkah-langkah pengamanan dengan mengadakan koordinasi di antara kesatuan-kesatuan ABRI, khususnya yang ada di Jakarta, melalui panglima masing-masing yang semuanya berhasil dihubungi kecuali Menteri / Panglima Angkatan Udara yang kemudian ternyata mendukung G 30 S / PKI. Setelah menilai keadaan pada waktu itu, dengan cepat Pangkostrad sampai pada kesimpulan bahwa penculikan dan pembunuhan terhadap perwira tinggi Angkatan Darat adalah merupakan bagian dari usaha perebutan kekuasaan pemerintahan, bahwa pimpinan Angkatan Udara membantu gerakan yang menamakan diri Gerakan 30 September.<sup>23</sup>

Di markas Komando Strategi Angkatan Darat (KOSTRAD), Pangkostrad Mayjend. Soeharto bersama Panglima Kodam V Jaya Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah

<sup>22</sup> A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas, Jld.VI Gunung Agung, Jakarta, 1987, hal.

<sup>23</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, Op.Cit., hal. 391

dan Jenderal A.H. Nasution mengadakan pembahasan dan penilaian atas peristiwa yang baru saja terjadi. Pimpinan-pimpinan TNI-AD ini kemudian mengambil suatu keputusan yaitu mengadakan aksi pembelaan dan pengejaran terhadap pasukan penculik perwira-perwira tinggi Angkatan Darat. Disinyalemen bahwa mereka menuju satu titik sasaran di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma.<sup>24</sup>

Usaha pembalasan dan pengejaran orang-orang yang terlibat dalam Gerakan 30 September segera dilakukan sehingga dalam waktu relatif singkat Gerakan 30 September dapat digagalkan.

Dengan gagalnya Gerakan 30 September, terungkaplah fakta bahwa PKI-lah yang mendalangi perebutan kekuasaan tersebut. Kenyataan itu membangkitkan kemarahan rakyat kepada PKI kian memuncak. Demonstrasi menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta diadilinya tokoh-tokoh PKI dilancarkan terus menerus oleh rakyat. Rumah-tokoh-tokoh PKI dan kantor-kantornya menjadi sasaran kemarahan rakyat. Konflik fisik antara massa dengan pendukung-pendukung PKI tidak dapat dihindarkan dan terjadi di mana-mana.

Meskipun keterlibatan PKI kian terungkap dan demonstrasi-demonstrasi rakyat yang menuntut pembubaran PKI semakin memuncak, namun presiden Soekarno belum juga mewujudkan penyelesaian politik secara adil seperti yang

---

<sup>24</sup> Soegiarso Soerojo, Op.Cit., hal. 219.

dijanjikannya pada sidang Paripurna Kabinet Dwikora di Bogor tanggal 6 Oktober 1965.<sup>25</sup>

Sikap Soekarno seperti itu justru menambah kemarahan rakyat, sampai kemudian pada tanggal 10 Januari 1966, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila yang dipelopori KAMI memenuhi halaman gedung DPR-GR mengajukan tiga tuntutan yang kemudian dikenal sebagai Tritura, yang isinya :

1. Bubarkan PKI;
2. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI, dan
3. Turunkan harga.<sup>26</sup>

Tuntutan-tuntutan rakyat ini sedikitpun tidak diperhatikan oleh presiden Soekarno, bahkan ketika presiden Soekarno menyempurnakan Kabinet Dwikora tanggal 24 Februari 1966, banyak tokoh-tokoh yang dicurigai terlibat dalam G 30 S/PKI didudukkan kembali sebagai Menteri.<sup>27</sup> Setiap demonstrasi dihadapi dengan kekerasan dengan menggunakan pasukan Cakrabirawa. Kemudian pada

---

<sup>25</sup> Dalam sidang paripurna kabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965, presiden juga menyatakan tidak membenarkan Gerakan 30 September serta pembentukan Dewan Revolusi. Presiden Soekarno juga menyatakan bahwa peristiwa semacam itu adalah suatu kejadian yang biasa terjadi dalam revolusi, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973, Op.Cit., hal. 60.

<sup>26</sup> Ibid., hal. 79.

<sup>27</sup> Ibid., hal. 86.

tanggal 25 Februari 1966, sebagai jawaban atas aksi-aksi mahasiswa, presiden memerintahkan penutupan Universitas Indonesia yang selama ini menjadi pusat kegiatan mahasiswa, dan selanjutnya diikuti dengan pembubaran KAMI.

Dengan ditutupnya Universitas Indonesia dan dibubarkannya KAMI, ternyata tidak dapat memadamkan kemarahan rakyat. Bahkan kemudian lahir suatu kekuatan yang lebih besar lagi yaitu yang tergabung dalam KAPPI. Mereka berikrar dan bersumpah untuk melanjutkan perjuangan membela keadilan dan memerangi kebatilan.<sup>28</sup>

Karena keadaan semakin gawat, sementara akan berlangsung Sidang Kabinet Dwikora, presiden Soekarno mengancam akan menindak lebih keras lagi jika para demonstran mencoba menggagalkan atau memboikot Sidang Paripurna Kabinet Dwikora tanggal 11 Maret 1966. Ketika sidang kabinet Dwikora berlangsung, di tengah-tengah persidangan presiden Soekarno menerima laporan dari ajudannya / Komandan pasukan Cakrabirawa bahwa disekitar istana terdapat pasukan-pasukan yang tidak dikenal. Laporan tersebut segera diedarkan kepada Waperdam Dr. Leimena, Dr. Soebandrio dan Chairul Saleh. Oleh presiden Soekarno pimpinan sidang diserahkan kepada Dr. Leimena, sedang ia sendiri ke luar meninggalkan sidang untuk pergi ke

---

<sup>28</sup>Dwi Windu Orde Baru, Op.Cit., hal. 55.

istana Bogor yang kemudian diikuti oleh Dr. Soebandrio.<sup>29</sup>

Setelah sidang ditutup, tiga orang perwira tinggi ABRI-AD yang menghadiri sidang yakni Mayjen. M. Yusuf (menteri perindustrian), Mayjen. Basuki Rakhmad (Panglima Brawijaya) yang kebetulan berada di Jakarta dan Mayjen. Amir Machmud (Pangdam V / Jaya) menghadap Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang tidak hadir dalam sidang karena sakit, meminta ijin untuk menemui presiden Soekarno di Bogor. Letnan Jendral Soeharto mengizinkan disertai pesan untuk disampaikan kepada presiden Soekarno, bahwa ia sanggup mengatasi keadaan apabila Bung Karno mempercayakan hal itu kepadanya.<sup>30</sup>

Di istana Bogor ketiga perwira tinggi AD tersebut berunding dengan presiden Soekarno dan para pembantunya. Kepada presiden pesan Letjen Soeharto tadi disampaikan, akhirnya presiden memutuskan untuk memberikan surat perintah kepada Letjen Soeharto guna mengatasi keadaan yang gawat, yang kemudian dikenal dengan surat perintah 11 Maret.

Dengan surat perintah 11 Maret itulah Letnan Jendral Soeharto, keesokan harinya membubarkan PKI dan kemudian "mengamankan" sejumlah menteri yang menurut penilaian rakyat terlibat dalam G 30 S/PKI atau setidaknya

---

<sup>29</sup>Oemar Effendi, Dokumentasi Kebangkitan Angkatan 66, Yayasan Angkatan 66, Semarang, 1973, hal. 55.

<sup>30</sup>Ibid., hal.55.

tidaknya dianggap menghalang-halangi pembubaran PKI.

Turunnya surat perintah 11 Maret inilah yang menandai lahirnya suatu babak baru dalam pemerintahan Indonesia yang dikenal dengan Orde Baru. Surat perintah 11 Maret ini kemudian dikukuhkan menjadi ketetapan MPRS no. IX/MPRS/1966 yang memberikan wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku menteri /Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi.<sup>31</sup>

Selanjutnya untuk memenuhi dan melaksanakan Tri-Tuntutan Rakyat di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan yang perlu diambeg-parama-artakan (didahulukan mana yang lebih penting untuk didahulukan), dibentuklah Kabinet Ampera melalui ketetapan MPRS no. XIII/MPRS/1966. Tugas pembentukan kabinet ini diserahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku pengemban ketetapan MPRS nomor IX/MPRS/1966.<sup>32</sup> Soeharto juga kemudian disertai tugas untuk memimpin Kabinet Ampera ini. Tapi dalam praktek ke-tata-negaraan tetap mengalami hambatan, karena situasi kepemimpinan nasional yang dualistis yaitu secara formal Bung Karno masih sebagai presiden, sedang Soeharto sebagai pemegang SUPERSEMAR.

---

<sup>31</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, Op.Cit., hal. 416

<sup>32</sup> Ibid., hal. 416.



Untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional ini maka MPRS mengeluarkan ketetapan no. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari presiden Soekarno dan pengangkatan Jendral Soeharto sebagai penjabat presiden.<sup>33</sup> Dengan ketetapan MPRS ini berarti kepemimpinan nasional sudah berada di tangan Orde Baru. Tetapi karena kepemimpinan nasional masih dalam status penjabat, yang menunjukkan kedaruratan, maka pada hari Kamis pukul 19.30 bertempat di istana negara, dengan disaksikan oleh ketua presidium Kabinet Ampera dan para menteri, presiden/mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan resmi telah menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban ketetapan MPRS no. IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto.<sup>34</sup>

#### B. Keterlibatan Organisasi Massa Dalam Proses Kelahiran Orde Baru.

Dalam sub bab di atas telah disinggung secara sepintas bahwa dalam proses kelahiran Orde Baru, organisasi massa juga mempunyai andil yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam menciptakan suasana yang kemudian melahirkan surat perintah 11 Maret sebagai

---

<sup>33</sup>H. Amirmachmud, Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1986, hal. 140-141.

<sup>34</sup>Marwati Djoened Poesponegoro, Op.Cit., hal. 425

suatu tanda adanya peralihan kekuasaan dari Orde Lama kepada Orde Baru.

Organisasi massa-organisasi massa ini memperlihatkan dirinya dalam bentuk kesatuan aksi. Meskipun sebelum kelahiran kesatuan aksi tersebut ada juga organisasi yang tampil menunjukkan aksinya melalui dirinya sendiri (seperti PII misalnya), namun akhirnya ia juga tampil bersama organisasi lain dalam bentuk kesatuan aksi.

Kesatuan aksi ini tampil untuk pertama kalinya pada tanggal 4 Oktober 1965 yaitu yang menamakan dirinya Kesatuan Aksi Pengganyangan (KAP) Gestapu PKI.

Pada tanggal 2 Oktober 1965, atas undangan G V Koti Brigjen. Sucipto SH., datang pimpinan-pimpinan parpol / ormas ke kantornya di jalan Merdeka Barat untuk mendengarkan briefing mengenai perkembangan yang terjadi di tanah air. Mereka yang datang adalah pimpinan-pimpinan NU, PSII, Partai Katolik, PNI, Parkindo, Sekretariat Bersama Golkar. Anggota FN, Perti, Muhammadiyah, Gemuis, Gasbiindo, HMI, PII dan KBKI. Dalam pertemuan ini Brigjen Sucipto SH. menerangkan segala sesuatu yang terjadi yang berhubungan dengan Gerakan 30 September. Ia menjelaskan bahwa G 30 S adalah perebutan kekuasaan yang didalangi oleh PKI, dijelaskan pula bahwa beberapa ormas PKI seperti Pemuda Rakyat, Gerwani dan lain-lain terlibat langsung dalam perebutan kekuasaan tersebut, serta dijelaskan tentang usaha-usaha Pak Harto dalam menumpas

gerakan kontra revolusi tersebut.<sup>35</sup>

Setelah semuanya jelas maka dibentuklah Kesatuan Aksi Pengganyangan (KAP) Gestapu pada tanggal 4 Oktober 1965 di bawah pimpinan Subchan ZE., KAP Gestapu ini adalah merupakan koordinasi dari semua orpol/ormas yang anti PKI.

Setelah KAP Gestapu lahir, disusul kemudian dengan lahirnya KAMI. Kelahiran KAMI ini adalah atas prakarsa Menteri PTIP, Dr. Syarif Thayeb yang memandang perlu adanya konsolidasi kekuatan anti PKI dari kalangan mahasiswa. Maka berdirilah KAMI pada tanggal 25 Oktober 1965.<sup>36</sup> Tidak seperti KAP Gestapu yang merupakan koordinasi seluruh orpol/ormas yang anti PKI, KAMI ini anggotanya spesifik organisasi-organisasi mahasiswa. Mereka yang tergabung dalam KAMI adalah HMI, PMII, PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), SOMAL (Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Mahasiswa Lokal), PEEMASI (Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia), GEMSOS (Gerakan Mahasiswa Sosialis) dan IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia).<sup>37</sup> Adapun yang menjadi ketua presidium KAMI

---

<sup>35</sup> Lukman Harun, Sekelumit Kenangan Dalam Pengganyangan Gestapu PKI, dalam Sepuluh Tahun Lubang Buaya Pemberontakan PKI, Islamic Research Institute, 1976, hal. 144.

<sup>36</sup> Sulastomo, Hari-hari Yang Panjang 1963-1966, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989, hal. 42.

<sup>37</sup> Francois Raillon, Politik Dan Idiologi Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1985, hal. 14.

adalah Cosmas Batubara.

Kesatuan aksi ini pada tanggal 10 Januari 1966 melakukan sebuah rapat terbuka yang berlangsung di muka fakultas Kedokteran UI. untuk merumuskan suara hati-nurani rakyat (yang selama ini terpendam) dalam bentuk tuntutan yang dikenal dengan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat).<sup>38</sup> Tritura inilah yang diperjuangkan melalui aksi-aksi, Demonstrasi-demonstrasi dan lain-lain.

Sepanjang awal tahun 1966 mereka melakukan aksi-aksi dan demonstrasi-demonstrasi yang mendapat dukungan dari masyarakat, karena sifat mereka yang non konformis dan tuntutan-tuntutan yang mereka bawakan. Mereka ber-sumpah untuk tetap meneruskan perjuangannya sampai tuntutan mereka dikabulkan. Untuk memadamkan aksi mereka ini Soekarno memerintahkan untuk menutup Universitas Indonesia dan membubarkan KAMI tapi kenyataan yang didapat justru sebaliknya. Mahasiswa Bandung segera datang ke Jakarta untuk menunjukkan solidaritasnya.

Sementara itu beberapa hari sebelum KAMI dibubarkan, telah lahir KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) yang merupakan kesatuan aksi dari organisasi-organisasi pelajar dan organisasi-organisasi pemuda. Sehingga ketika KAMI dibubarkan, KAPPI segera mengambil alih memimpin perjuangan. Kekuatan KAPPI ini justru lebih besar dari kekuatan KAMI. Usia anggota-anggota

---

<sup>38</sup> Ibid., hal. 16.

KAPPI yang begitu muda, kepolosan mereka dan kesan bahwa mereka itu masih lemah merupakan kekuatan psikologis dan taktis yang mereka miliki untuk menguasai jalan-jalan raya di ibukota.<sup>39</sup> Setelah itu kemudian lahir kesatuan aksi yang lain seperti KAGI (guru), KASI (sarjana), KAWI (wanita) serta KABI (buruh).

Aksi-aksi terus dilakukan sampai kemudian pada puncaknya tanggal 11 Maret 1966 saat dikeluarkannya surat perintah 11 Maret (Supersemar) di mana Soekarno memberikan sebagian besar kekuasaannya kepada Soeharto.<sup>40</sup> Surat perintah 11 Maret itu pula yang menandai kelahiran Orde Baru.

Aksi-aksi yang mereka lakukan ini secara diam-diam ternyata mendapat dukungan dari tentara yang selalu melindungi mereka dari serangan unsur-unsur yang pro komunis. Di samping itu mereka juga menjalin hubungan erat dengan beberapa tokoh militer. Di antaranya Jendral Darsono, Kemal Idris dan Sarwo Edi. Mereka inilah orang-orang di belakang layar yang memainkan peranan penting dalam pengambil-alihan situasi dan tekanan terhadap komunis pasca 30 September.<sup>41</sup>

Dari uraian di atas jelas kiranya betapa besar

---

<sup>39</sup> Ibid., hal. 14.

<sup>40</sup> Ibid., hal. 19.

<sup>41</sup> Ridwan Saidi, Mahasiswa Dan Lingkaran Politik, PT. Mapindo Mulathama, Jakarta, 1989, hal. 77.

peranan organisasi massa dalam melahirkan Orde Baru. Proses peralihan kekuasaan dari Orde Lama kepada Orde Baru, dijalankan atas dasar partnership antara tentara dan organisasi-organisasi massa (mahasiswa, pemuda dan pelajar) yang tergabung dalam kesatuan-aksi.<sup>42</sup>

### C. Dasar Dan Tujuan Berdirinya Orde Baru.

Yang menjadi dasar berdirinya Orde Baru adalah ketetapan-ketetapan MPRS yaitu :

1. Tap. no. IX/MPRS/1966 tentang pengukuhan Supersemar.
2. Tap. no. XIII/MPRS/1966 tentang pembentukan Kabinet AMPERA di mana tugas pembentukan tersebut diserahkan kepada Soeharto sekaligus untuk memimpinnya.
3. Tap. no. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari presiden Soekarno dan pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai penjabat presiden.
4. Tap. no. XLIV/MPRS/1968 tentang pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai presiden penuh.

Sedang yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pemerintahan adalah : 1. Dasar Idiil : Pancasila,  
2. Dasar konstitusional: UUD 1945.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>B.J. Boland, Pergumulan Islam Di Indonesia, Grafittipers, Jakarta, 1985, hal. 148.

<sup>43</sup>H. Amirmachmud, Op.Cit., hal. 137.

Adapun yang menjadi tujuan berdirinya Orde Baru adalah :

1. Tujuan khusus (yang berhubungan dengan berdirinya Orde Baru) yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.
2. Tujuan umum (yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan) yaitu sebagaimana tujuan negara dan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid., hal. 137; Oemar Effendi, Dokumentasi Angkatan 66, Yayasan Angkatan 66, Semarang, 1973, hal. 96.